PERATURAN DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 02 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH DESA DURIWETAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MADURAN DESA DURIWETAN

Sekretariat: Jl. Raya RT 006 RW 001Desa Duriwetan Kec. Maduran Kab. Lamongan Kode Pos 62261

PERATURAN DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DURIWETAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Duriwetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA DURIWETAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 413.480.000.00 (Empat ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp 413.480.000,00
b.	Belanja	
	1) Langsung	Rp 251.480.000,00
	2) Tidak Langsung	Rp 162.000.000,00
C.	Pembiayaan	•
	1) Penerimaan	Rp 413.480.000,00
	2) Pengeluaran	Rp 413.480.000,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Duriwetan Pada tanggal 8 Januari 2014

KEPALA DESA DURIWETAN

SAFRONDLI

Lampiran Peraturan Desa Duriwetan Kec. Maduran

Kab. Lamongan

Nomor Tanggal : 02 Tahun 2014 : 08 Januari 2014

Perihal

: Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Duriwetan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN TAHUN ANGGARAN 2014

KODE		TAHUN	TAHUN	
REKENING	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
KEKENING		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asii Desa	139,800,000	121,820,000	
1.1.1	Hasii Usaha Desa	100,000,000	79,500,000	
1.1.1.1	HIPAM	10,000,000	12,000,000	
1.1.1.2	Hasil Areal Pertanian	90,000,000	60,000,000	
1.1.1.3	Tambatan Perahu		7,500,000	
1.1.2	Hasii Pengelolaan Kekayaan Desa	31,500,000	31,500,000	
1.1.2.1	Penyewaan tanah kas desa			
1.1.2.1.1	Hasil penyewaan bengkok Kepala Desa	10,000,000	10,000,000	
1.1.2.1.2	Hasil penyewaan bengkok Sekdes	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.1.3	Hasil penyewaan bengkok Kaur Umum	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.4	Hasil penyewaan bengkok Kaur Keu.	2,000,000	2,000,000	
.1.2.1.5	Hasil penyewaan bengkok Kasi Pem.	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.6	Hasil penyewaan bengkok Kasi Ekbang	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.7	Hasil penyewaan bengkok Kasi Trantib	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.8	Hasil penyewaan bengkok Kasi Kesmas	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.9	Hasil penyewaan bengkok Kasi Pemb. Per.	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.10	Hasil penyewaan bengkok Kasun	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.11	Hasil penyewaan tanah sugo dayo			
1.1.2.2	Pasar desa	500,000	500,000	
1.1.2.3	Pasar hewan			<u>.</u>
1.1.2.4	Tambatan perahu			
1.1.2.5	Bangunan desa (Ruko desa, Tempat peristirahatan dli			
1.1.2.6	Lain-lain kekayaan milik desa (Asset desa)			
149	Usell Swedows den Bertleinen	6,000,000	6 000 000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		6,000,000	
1.1.3.1	Swadaya ADD	2,500,000	2,500,000	·
1.1.3.2	Swadaya Bansun Iuran PHBN	1,000,000 2,500,000	1,000,000 2,500,000	
1.1.3.3	turan Pribin	2,500,000	2,500,000	
1.1.4	Hooli Catana Payana	0	0	
1.1.4 1.1.4.1	Hasil Gotong Royong	- 4		
1. 1.4. 1	Nilai tenaga gotong royong			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asii Desa yang sah	2,300,000	4,820,000	
1.1.5.1	Jasa Surat menyurat	1,000,000	2,000,000	
1.1.5.1 1.1.5.2	Jasa surat menyurat Jasa administrasi NTCR	500,000	500,000	
1.1.5.2	Jasa administrasi jual beli tanah	200,000	1,500,000	
1.1.5.4	Jasa pungut desa (jual beli ternak, peralatan dil)	100,000	320,000	,
1.1.5.5	Jasa administrasi ijin keramaian / kesenian	500,000	500,000	
1.1.0.0	out deliminous, gar northidaer / noteman		000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	4,500,000	4,500,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten / kota	3,000,000	-,,	
1.2.2	Bagi hasil penarikan PBB	4,500,000	4,500,000	
1 -40-6-	wagi ilaan pananimii 1 ww	.,000,000	.,000,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
	1			

1	2	4	4	5
···	Baulan Bana Barimbanaan Kayangan			
1.4	Pusat dan Daerah	47,000,000	47,000,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	5,500,000	5,500,000	
1.T.S.	D, 110011	3,030,030	0,000,000	
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,			
1.5	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	331,622,000	215,160,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	81,042,000	45,000,000	
1.5.1.1	Plengsengan kali pertanian (Program PNPM-MP		.0,000,000	
1.0.1.1	2013)	81,042,000		
1.5.1.2	Rabat jalan RT2/1 s.d RT1/1 (Program PNPM-MP			
1.0.1.2	2014)		45,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	225,000,000	140,000,000	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa	180,000,000		
1.5.2.2	Jalan Poros	45,000,000	40,000,000	
1.5.2.3	Jalan Lingkungan RT7/1 s.d RT5/1		50,000,000	
1.5.2.4	Jalan Lingkungan RT2/2 s.d RT4/2		50,000,000	
4.7.0	Bantuan Keuangan Pemerintah	25 500 000	46 000 000	· · · ·
1.5.3	Kabupaten/Kota	25,580,000	15,080,000	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	10,580,000	10,580,000	
1.5.3.2	TPBPD	4,400,000	4,400,000	
1.5.3.3	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000		
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	100,000	100,000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti	4,000,000		
1.5.3.6	Kompensasi sekdes			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes			
1.6	Hibah	0	25,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	Hibah dari pemerintah propinsi Kopwan		25,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		1	
 	Triban dan Kolompok maayarakat pererangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7 1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia	0	0	
1.7 1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller	0	0	
1.7 1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor	0		
1.7 1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN	522,922,000		
1.7 1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor			
1.7.1 1.7.2	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			
1.7.1 1.7.2	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA	522,922,000	413,480,000	
1.7.1 1.7.2 2 2.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	522,922,000 374,922,000	413,480,000	
1.7.1 1.7.2 2 2.1.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) Belanja Pegawal/Honorarium	522,922,000 374,922,000 4,300,000	413,480,000 251,480,000 4,300,000	
1.7.1 1.7.2 2 2.1.1 2.1.1	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) Belanja Pegawal/Honorarium Honor PKBD/Sub PKBD	522,922,000 374,922,000 4,300,000 500,000	413,480,000 251,480,000 4,300,000 500,000	
2 2.1.1 2.1.1 2.1.1.2	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) Belanja Pegawal/Honorarium Honor PKBD/Sub PKBD Honor Modin Kematian laki-laki dan perempuan	522,922,000 374,922,000 4,300,000 500,000 300,000	413,480,000 251,480,000 4,300,000 500,000 300,000	
2 2.1.1 2.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) Belanja Pegawal/Honorarium Honor PKBD/Sub PKBD Honor Modin Kematian laki-laki dan perempuan Insentif Ketua-ketua RT	522,922,000 374,922,000 4,300,000 500,000 300,000 2,600,000	413,480,000 251,480,000 4,300,000 500,000 300,000 2,600,000	
2 2.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) Belanja Pegawal/Honorarium Honor PKBD/Sub PKBD Honor Modin Kematian laki-laki dan perempuan Insentif Ketua-ketua RT Insentif ketua-ketua RW	522,922,000 374,922,000 4,300,000 500,000 300,000 2,600,000 200,000	413,480,000 251,480,000 4,300,000 500,000 300,000 2,600,000	
2 2.1.1 2.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3	Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari pengusaha huller Sumbangan dari pengusaha materia Sumbangan dari pengusaha hand traktor JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) BELANJA Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) Belanja Pegawal/Honorarium Honor PKBD/Sub PKBD Honor Modin Kematian laki-laki dan perempuan Insentif Ketua-ketua RT	522,922,000 374,922,000 4,300,000 500,000 300,000 2,600,000	413,480,000 251,480,000 4,300,000 500,000 300,000 2,600,000	

٠.

1	2	4	4	5
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	17,280,000	18,080,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	540,000	540,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Perangkat desa	2,880,000	2,880,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas Kepala Dusun	360,000	360,000	
2.1.2.1.4	Belanja THR Perangkat dan ketua RT	1,500,000	1,300,000	
2.1.2.1.5	Kegiatan PHBN/PHBI	7,500,000	8,500,000	
2.1.2.1.6	Biaya rapat Kades, Perangkat, dan LKD	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.1.7	Belanja lain-lain	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	340,442,000	229,100,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan kantor Meja dan kursi			
2.1.2.2.3	Pemeliharaan kantor dan balai desa	500,000	200,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	700,000	700,000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas kades	200,000	200,000	
2.1.2.2.6	Belanja material ADD	36,000,000	36,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja material bansun	5,500,000 81,042,000	5,500,000	
2.1.2.2.8	Plengsengan kali pertanian (Program PNPM-MP 2013) Rabat jalan RT2/1 s.d RT1/1 (Program PNPM-MP 2014)	01,042,000	45,000,000	
2.1.2.2.9 2.1.2.2.10	Jalan Lingkungan RT7/1 s.d RT5/1		50,000,000	
2.1.2.2.11	Jalan Lingkungan RT2/2 s.d RT4/2		50,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja material jalan poros	45,000,000	40,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja material pasar desa	160,000,000	,-20,300	
2.1.2.2.14	Pembangunan DAM kali beran	10,000,000		
2.1.3	Belanja Modal	12,900,000	-	
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja modal jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja modal komputer	4,000,000		
2.1.3.4	Belanja modal printer	900,000		
2.1.3.5	Belanja modal meubeler	8,000,000		
	Belanja Tidak Langsung			
2.2	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+ s.d +2.2.11)	148,000,000	162,000,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	105,000,000	104,500,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	,		
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	10,000,000	10,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	9,600,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	7,800,000	7,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur Umum	1		
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur Umum	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur Umum	7,800,000	7,800,000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur Keuangan			
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD Kaur Keuangan	7,800,000	7,800,000	
	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Pemerintahar			
2.2.1.6 2.2.1.6.1	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.6.1	TPAPD Kasi Pemerintahan	7,800,000	7,800,000	
		.,000,000	,,000,000	
2.2.1.7	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Ekbang	2 000 000	2 000 000	
2.2.1.7.1	Penghasilan tetap Kasi Ekbang TPAPD Kasi Ekbang	2,000,000 7,800,000	2,000,000 7,800,000	
2.2.1.7.2		7,000,000	7,000,000	
12 2 4 0	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Kesmas			
2.2.1.8		0.000.000	0.000.000	
2.2.1.8.1 2.2.1.8.2	Penghasilan tetap Kasi Kesmas TPAPD Kasi Kesmas	2,000,000 7,800,000	2,000,000 7,800,000	

-

.

-

1	2	4	4	5
2.2.1.9	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Pemb.			
	Perem.			
.2.1.9.1	Penghasilan tetap Kasi Pemb. Perem.	2,000,000	2,000,000	
.2.1.9.2	TPAPD Kasi Pemb. Perem.	7,800,000	7,800,000	
.2.1.10	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi Trantib			
.2.1.10.1	Penghasilan tetap Kasi Trantib	2,000,000	2,000,000	
.2.1.10.2	TPAPD Kasi Trantib	7,800,000	7,800,000	
2.2.1.11	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD		-	
2.1.11	Representatif BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.11.2	Tunjangan BPD	1,500,000	1,000,000	
		1,000,000	1,000,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
.2.3	Belanja Bantuan Sosial	15,500,000	15,500,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	9,500,000	9,500,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih makam	500,000	500,000	
2.2.3.3	Kegiatan Posyandu	2,000,000	2,000,000	
2.2.3.4	Makanan tambahan BALITA	3,000,000	3,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Hansip	500,000	500,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	27,500,000	42,000,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,500,000	3,500,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2,600,000	2,600,000	
2.2.4.8	Operasional LINMAS	5,000,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional KOPTAN/HIPPA			
2.2.4.10	Operasional PJOK, PJAK, Penanggung jawab	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.11	Purnabhakti 3 perangkat	6,000,000		
2.2.4.12	Kopwan		25,000,000	
105	Delevie tok toudure		0	
2.2.5	Belanja tak terduga	0	- 4	
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	522,922,000	455,480,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	522,922,000	413,480,000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		,100,000	
2. 1. 1	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	522,922,000	413,480,000	
0.1.2	Penerimaan Pinjaman	022,022,000	410,400,000	
		E22 022 000	442 490 000	
	Pengeluaran Pembiayaan	522,922,000	413,480,000	
3.2.1	Belanja Langsung	374,922,000	251,480,000	
3.2.2	Belanja Tdak Langsung	148,000,000	162,000,000	
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di Duriwetan Pada tanggal 8 Januari 2014

KEPALA DESA DURIWETAN

SAFRONDLI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

Sekretariat: Jl. Raya RT 006 RW 001 Desa Duriwetan Kec. Maduran Kab. Lamongan Kode Pos 62261

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN

NOMOR: 188/02/413.310.03.1/2014

TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA DURIWETAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIWETAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Duriwetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/F)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
- 17. Peraturan Desa Duriwetan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Duriwetan Pada tanggal 8 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIWETAN

SHOLIKH, S.Pd.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

Sekretariat: Jl. Raya RT 006 RW 001 Desa Duriwetan Kec. Maduran Kab. Lamongan Kode Pos 62261

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA DURIWETAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIWETAN KECAMATAN MADURAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor: 027 / 03 / 413.310.03.1 / 2014

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Duriwetan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duriwetan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Duriwetan

. Nur Sholikh, S.Pd. Ketua

2. Arip Prianto
Wakil Ketua

3. <u>Saeful Rohim, S.Pd.I</u> Sekretaris

4. <u>Mamzumi</u>
Wakil Sekretaris

5. <u>Surahna, S.Pd.</u> Bid. Pem. & Hukum

6. Nashiruddin, S.Pd. Bid. Pem. & Hukum

7. Munadi Bid. Pem. & Hukum

8. <u>Martutik</u> Bid. Kemasyarakatan

9. <u>M. Mustaqim</u> Bid. Kemasyarakatan

10. <u>Fhatra Alex Candra</u> Bid. Kemasyarakatan

11. <u>Siswantono</u> Bid. Ekbang This

Tanda Tangan:



